



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



DETERMINASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI APARATUR DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PENGELOLAAN DANA DESA

DETERMINATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM, INFORMATION TECHNOLOGY, APPARATUS COMPETENCY AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN VILLAGE FUND MANAGEMENT

Wina Alfiatri^{1*}, Novita Indrawati², Adhitya Agri Putra³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

*Email: winaalfiatri22@gmail.com

Keywords

Internal control system, utilization of information technology, apparatus competence, organizational commitment, village fund management.

Article informations

Received:

2021-12-27

Accepted:

2022-03-23

Available Online:

2022-04-01

Abstract

The goal of this study is to determine and test the impact of internal control systems, information technology use, apparatus competency, and the organization's commitment to village fund management. This study took place in the villages of Kuantan Singingi Regency's Cerenti Subdistrict. The population of 11 villages in Kuantan Singingi Regency's Cerenti Subdistrict was studied. A saturation sampling method is a sampling approach in which all members of the population are used as samplers. Respondents in this study were village apparatus in Cerenti Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. Internal control systems, information technology utilization, apparatus competency, and organizational commitment all have a substantial impact on village fund administration, according to data analysis utilizing multiple linear regressions. The results of this study are expected to be a suggestion for the village government, especially the village apparatus in Cerenti Subdistrict in improving village fund management by paying attention to the factors studied in this study.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa memasuki era baru setelah disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebelumnya, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas desentralisasi sebagai bagian dari pemerintah daerah, namun sekarang pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas rekognisi subsidiaritas.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selanjutnya setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. APB Desa terdiri atas pendapatan desa,



belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Pendapatan asli desa berupa: hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya. Sedangkan kelompok transfer terdiri atas: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi atau Kabupaten/kota, dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Proporsi dana desa dalam APBN terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pada tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun tahun 2018 sebesar Rp 60 Triliun, pada tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun dan pada tahun 2020 sebesar 72 Triliun (www.djpk.kemenkeu.go.id). Dana desa dengan jumlah yang cukup besar tersebut harus dikelola dengan baik agar menghasilkan *output* sesuai dengan harapan pemerintah. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi penyelewengan ataupun penyalahgunaan anggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini menjelaskan bahwa monopoli kekuatan oleh pemimpin ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Kepala Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar Rp576.652.000. Dimana dana tersebut seharusnya digunakan untuk program pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan yang terdiri dari 3 paket kegiatan senilai Rp799.687.000, namun tidak digunakan sebagaimana mestinya (riaulink.com). Berdasarkan kasus tersebut, masih ditemukan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat desa yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan dana desa. Dana desa harus menjunjung asas-asas yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, apabila terjadi korupsi dana desa maka akan berdampak juga terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, karena dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Kemudian semua akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan dana desa dituntut akuntabel dan transparan namun masih banyak permasalahan yang terjadi mengenai dana desa, seperti penggunaan dana untuk kepentingan individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pemerintahan desa perlu adanya pengelolaan dana desa yang baik agar tidak disalahgunakan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa, antara lain sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen pada organisasi.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi, menurut Warsita (2020) teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara bermakna. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia (2018), Sri (2019) dan Perdana (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) dimana pemanfaatan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparatur juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa, Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Mada *et al.*, (2017), Sri (2019), Medianti (2018) serta Masruhin dan M. Elfan (2019) ditemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan penelitian Nurkhasanah (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu komitmen pada organisasi, menurut Sutrisno dalam Hafiz, (2017) Komitmen adalah perasaan keterkaitan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggota. Hal ini sejalan dengan penelitian Medianti (2018) dan Karim *et al.*, (2019) yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rezkiyanti (2019) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dari penelitian sebelumnya di Kabupaten Takalar menjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, waktu penelitian dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian sebelumnya pada tahun 2019, dan adanya penambahan variabel independen yaitu komitmen pada organisasi. Komitmen pada organisasi diambil dari penelitian Medianti (2018) yang menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Artinya semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi aparatur dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Cerenti Kabupaten Kuansing.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa

PP No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan



dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan sangat penting karena dengan adanya sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada asas-asas yang perlu berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik juga dapat meningkatkan pengelolaan dana desa, dimana sistem pengendalian internal dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya. Apabila sistem pengendalian internal yang diterapkan baik maka pengelolaan dana desa akan semakin terjamin sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. didukung juga oleh penelitian Widyatama dan Novita (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna (Warsita, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis. Teknologi yang baik berupa komputer dan internet dapat memudahkan pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam pengelolaan dana desa, seiring dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi semakin canggih, dengan demikian apabila aparatur desa dapat memanfaatkan teknologi informasi maka akan mempermudah pekerjaannya khususnya dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Sri (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh karena dapat mempermudah aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Wibowo (2017), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan dana desa harus mampu patuh terhadap

aturan terkait dengan pengelolaan dana desa, dimana jumlah dana desa yang diterima cukup besar sehingga perlu aparatur yang berkompetensi dan sesuai bidangnya untuk mengelola dana desa tersebut. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sehingga pengelolaan dana desa yang dihasilkan juga baik. Apabila aparatur desa kurang berkompetensi maka akan sulit dalam melakukan pengelolaan dana desa sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai, bahkan dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu, aparatur yang berkompetensi sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Medianti (2018), menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola dana desa maka pengelolaan dana desa yang dihasilkan akan semakin baik pula. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H3: Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pengaruh Komitmen pada Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Komitmen adalah perasaan keterkaitan psikologis dan fisik pegawai terhadap organisasi tempat ia bekerja atau organisasi dimana ia menjadi anggotanya (Sutrisno dalam Hafiz, 2017). Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi tempat ia bekerja dapat menjadi pendorong atau semangat kerja yang tinggi, sehingga dengan usaha yang dilakukan sesuai dengan tugasnya dalam pengelolaan dana desa bisa mencapai tujuan pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. Penelitian Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Larastika (2018), Sri (2019), dan Aulia (2018) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah aparatur desa pada 11 desa yang ada di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Responden pada penelitian ini adalah semua aparatur desa yang berjumlah 8 yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kaur keuangan), kaur umum dan tata usaha, kaur perencanaan/program, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan dan kepala seksi kesejahteraan, dengan jumlah sampel adalah 88 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai *sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner. Jenis skala pengukuran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan pada kuesioner dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Skala ordinal ini menggunakan 5 angka penilaian yaitu: (1)



Sangat Tidak Setuju (2) Tidak Setuju (3) Netral (4) Setuju (5) Sangat Setuju.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Indikator dalam penelitian berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdiri dari 29 pernyataan dengan 5 poin skala ordinal.

Sistem Pengendalian Internal

Menurut PP No. 60 Tahun 2000 bahwa Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Pahlawan (2020) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Pertanyaan terkait sistem pengendalian internal terdiri dari 10 pernyataan dengan 5 poin skala ordinal.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Perdana, 2018). Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Pahlawan (2020) yaitu: Adanya *software* pendukung, ketersediaan jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, proses terkomputerisasi. Pertanyaan terkait pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 7 pernyataan dengan 5 poin skala ordinal.

Kompetensi Aparatur

Menurut Wibowo (2017), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Indikator dalam penelitian ini diambil dari Medianti (2018), yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan perilaku (*attitude*). Pertanyaan terkait kompetensi aparatur terdiri dari 13 pernyataan dengan 5 poin skala ordinal.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Indikator kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian (Madaet al, 2017) yaitu komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Terdiri dari 9 pernyataan dengan 5 poin skala ordinal.

Teknik Analisis

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS versi 25.0. Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan: Y = Pengelolaan Dana Desa

X₁ = Sistem Pengendalian Internal

X₂ = Pemanfaatan Teknologi Informasi

- X_3 = Kompetensi Aparatur
 X_4 = Komitmen Pada Organisasi
 a = Bilangan Konstanta
 b = Koefisien Arah Regresi
 e = *Standar Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018). Hasil statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 yang menunjukkan rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti data sudah baik.

Tabel 1

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	80	18	47	37.16	7.454
Pemanfaatan Teknologi Informasi	80	15	34	25.69	4.767
Kompetensi Aparatur	80	48	63	54.81	3.865
Komitmen pada Organisasi	80	23	30	26.46	2.128
Pengelolaan Dana Desa	80	57	133	99.58	17.658

Sumber: Data olahan (2021)

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov Smirnov.

Tabel 2

Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	7.58534631
Most Extreme Differences	Absolute	0.063
	Positive	0.063
	Negative	-0.049
Test Statistic		0.063
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Sumber: Data olahan (2021)

Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi unstandardized residual sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas. Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0, dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut.



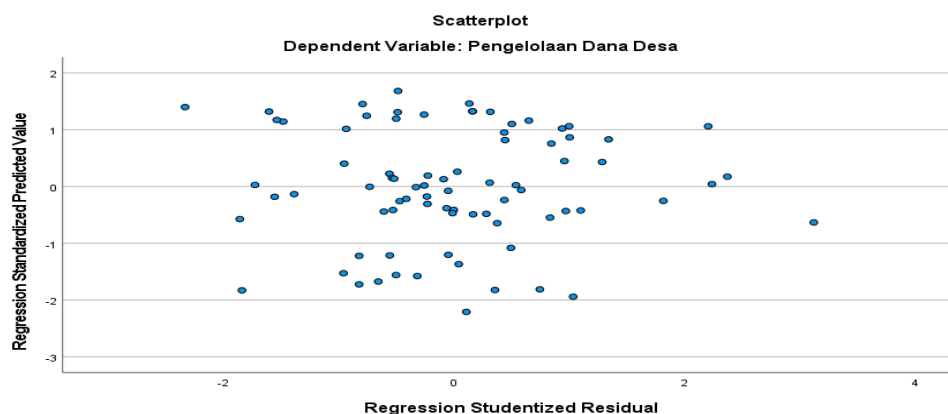
Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Sistem Pengendalian Internal	0,326	3,070	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,336	2,978	Tidak terdapat Multikolinieritas
Kompetensi Aparatur	0,545	1,836	Tidak terdapat Multikolinieritas
Komitmen pada Organisasi	0,89	1,124	Tidak terdapat Multikolinieritas

Sumber: Data olahan (2021)

Tabel 3 menunjukkan nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas: Scatterplot

Sumber: Data olahan (2021)

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variable dependen yaitu pengelolaan dana desa menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R) yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,908 ^a	0,824	0,815	7,50250

Sumber: Data olahan (2021)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,815 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen pada organisasi sebesar 81,5 % sedangkan sisanya 18,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-64.116	15.664		-4.093	0.000
Sistem Pengendalian Internal	0.694	0.200	0.297	3.472	0.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.547	0.305	0.423	5.065	0.000
Kompetensi Aparatur	1.341	0.320	0.280	4.194	0.000
Komitmen pada Organisasi	0.873	0.415	0.107	2.103	0.039

Sumber: Data olahan (2021)

Dari tabel 5 maka didapatkan model persamaan regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = -64,116 + 0,694X + 1,547X + 1,341X + 0,873X + e$$

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.001 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $3,472 > t$ tabel 1,99167 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bagus sistem pengendalian internal maka pengelolaan dana desa yang dihasilkan semakin baik.

Hasil uji yang diujikan antara variabel sistem pengendalian interna dibagi beberapa indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dari indikator tersebut dapat mengukur sistem pengendalian internal seseorang, yang mana sistem pengendalian internal merupakan sejumlah prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan sebuah organisasi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga aparatur desa yang menjalankan sistem pengendalian internal yang tinggi maka akan memicu sikapnya yang mengendalikan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pengelolaan dana desa yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Rosyidi (2018) bahwa sistem pengendalian internal aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $5,065 > t$ tabel 1,99167 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur yang dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia maka akan membantu pekerjaannya menjadi lebih mudah sehingga pengelolaan dana desa yang dihasilkan akan bagus.

Hasil uji yang diujikan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dibagi beberapa indikator yaitu adanya *software* pendukung, ketersediaan jaringan internet, dimanfaatkan sesuai ketentuan, proses terkomputerisasi, yang mana pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam



pengelolaan dana desa, seiring dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi semakin canggih, pengelolaan dana desa juga memiliki prosedur yang telah ditetapkan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, salah satunya menggunakan aplikasi siskeudes, dengan demikian aparatur desa yang dapat memanfaatkan teknologi informasi maka akan mempermudah pekerjaannya khususnya dalam pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis. Dengan demikian aparatur desa yang dapat memanfaatkan teknologi informasi maka akan mempermudah pekerjaannya khususnya dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri (2019) dan Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh karena dapat mempermudah aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $4,194 > t$ tabel $1,99167$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi yang kompeten dapat meningkatkan pengelolaan dana desa. Hasil uji yang diujikan antara variabel kompetensi aparatur dibagi beberapa indikator yaitu pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan perilaku (*attitude*). Kompetensi aparatur merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang kompeten akan menghasilkan output yang baik sehingga pengelolaan dana desa yang dihasilkan juga baik. Oleh karena itu, aparatur yang berkompetensi sangat penting dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rezkiyanti (2019) dan Medianti (2018), menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola dana desa maka pengelolaan dana desa yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Pengaruh Komitmen pada Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.039 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $2,103 > t$ tabel $1,99167$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima bahwa komitmen pada organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi komitmen pada organisasi maka semakin terwujud pengelolaan dana desa yang baik.

Hasil uji yang diujikan antara variabel komitmen pada organisasi dibagi beberapa indikator yaitu yaitu komitmen afektif (*affective commitment*), komitmen berkelanjutan (*continuance commitment*), dan komitmen normatif (*normative commitment*). Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana sikap individu atau pegawai mengenal atau terkait pada organisasinya. Semakin baik komitmen aparatur desa pada organisasi akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa. Aparatur yang memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi tempat ia bekerja dapat menjadi pendorong atau semangat kerja yang tinggi, sehingga dengan usaha yang dilakukan sesuai dengan tugasnya dalam pengelolaan dana desa bisa mencapai tujuan pemerintah khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Medianti (2018), Sri (2019) dan Aulia (2018) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa variabel sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur dan komitmen pada organisasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Cerenti. Keterbatasan pada penelitian ini adalah model penelitian hanya menguji pengaruh variabel hubungan secara langsung dan objek penelitian yang masih dalam kawasan kecil, sehingga masih memungkinkan untuk melakukan penelitian dengan menguji hubungan dengan memediasi antar variabel dan melakukan pada objek penelitian lainnya. Penggunaan kuesioner dalam metode analisis memberikan jawaban dalam ruang lingkup kecil sehingga jawaban hasil pada penelitian ini hanya mengacu pada pertanyaan yang ada dikuesioner saja. Selain itu peneliti sulit menemui responden dalam pengumpulan data kuesioner dikarenakan pada masa pandemi covid, aparatur desa bekerja secara bergantian.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran yang bisa diusulkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu dapat menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini dengan model penelitian memediasi antar variabel dan memperluas objek penelitiannya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode analisis lainnya selain kuesioner seperti wawancara ataupun pengamatan lainnya terhadap pengelolaan dana desa agar dapat memberikan jawaban yang lebih luas lagi dan dengan ruang lingkup yang lebih besar. Kemudian metode pengumpulan data bisa dilakukan melalui *google form*.

REFERENSI

- Aulia, P. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1-13.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25*.
- Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. *JOM FEKON*, 528-542.
- Karim, S. A., Lahay, M., Monoarfa, Z., Adam, R. P., & Suardi. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Buntongi Kec. Ampapa Kota Kab. Tojo Una Una). *Dosen SKU Universita Tadulako*, 18-24.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 106-115.
- Mashurin, A., & Kaukab, M. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 118-130.
- Medianti, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *JOM FEB*, 1-13.
- Nurkhasanah. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Universitas Islam Negeri Semarang*.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 162-172.



- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (<https://peraturan.bpk.go.id>).
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (<http://www.bpkp.go.id>).
- Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 17-24.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB*, 1-14.
- Sri, R. E. (2019). Peran Tingkat Pendidikan Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambakromo. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Warsita, B. (2020). *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1-20.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- <https://riaulink.com/>